



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PERUNDINGAN
PERDAGANGAN JASA**

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

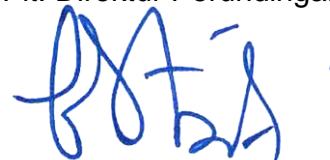
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menjadi pedoman bagi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan dan meningkatkan peran diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia atas produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam mendukung tujuan tersebut kegiatan perundingan perdagangan jasa yang dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah perundingan yang dilakukan secara sinergis di 3 (tiga) fora, yakni multilateral, regional dan bilateral.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menyusun laporan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permendag 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja dengan melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien.

Jakarta, 08 Maret 2024

Plt. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa



Basaria Tiara L Gaol

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses jasa, Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum perundingan perdagangan internasional baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Terkait dengan hal tersebut, maka Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa sebagai salah satu unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan jasa di berbagai forum internasional.

Guna peningkatan akses pasar jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dimana secara keseluruhan terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Tabel 1.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran 1 :					
Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional					
1.	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perundingan	20	20	100
Sasaran 2 :					
Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional					

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Dokumen	3	3	100
Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
1.	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	Dokumen	4	4	100
2.	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persentase	83 %	83 %	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan	9
1.3 Struktur Organisasi.....	9
1.4 Peran Strategis Organisasi	12
1.5 Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	15
2.2 Rencana Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja.....	22
3.2 Sasaran I : Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia Di Pasar Internasional	24
3.3 Progres Perundingan Perdagangan Jasa Prioritas Tahun 2023	53
3.4 Sasaran II : Tersedianya Dukungan Dalam Rangka Meningkatkan Peran Eksport Jasa Terhadap Perekonomian Nasional	58
3.5 Sasaran III: Meningkatnya Implementasi Dan Pemahaman Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	61
3.6 Akuntabilitas Keuangan.....	73
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan Di Masa Yang Akan Datang	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	2
Tabel 2.1 Pagu Alokasi Anggaran DPPJ.....	19
Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa	19
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa	20
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2023	22
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional.....	24
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa	10
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2024	11
Gambar 3.1 Perundingan Putaran Ketiga IEAEU FTA pada 13-15 Desember 2023	27
Gambar 3.2 Pertemuan pertama Komite Bersama (<i>The First Joint Committee Meeting</i>) pada 11-12 Desember 2023.....	28
Gambar 3.3 WG TiS pada perundingan ICA CEPA putaran ke-5 di Ottawa, Canada	29
Gambar 3.4 The 1st <i>Joint Commission Meeting</i> untuk Perjanjian Indonesia-Chile CEPA	30
Gambar 3.5 Perundingan Indonesia-EU CEPA putaran ke-16 di Brussels, Belgia pada 4-8 Desember 2023.....	32
Gambar 3.6 Pertemuan <i>Chief Negotiator</i> Perundingan Protokol Perubahan IJEPA pada tanggal 23 Agustus 2023.....	33
Gambar 3.7 Penandatanganan MoU as amended on the Indonesia - Australia Skills Development Exchange Pilot di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2023	35
Gambar 3.8 Proses <i>upgrading</i> AANZFTA telah memasuki tahap finalisasi perundingan untuk isu-isu spesifik yang ada pada tanggal 14-17 Februari 2023....	36
Gambar 3.9 Pertemuan ke-4 RCEP <i>Joint Committee</i> tanggal 16-19 Juli 2023 di Surabaya, Indonesia	37
Gambar 3.10 Pertemuan pertama the ASEAN <i>Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee</i> (DEFA NC) di Jakarta pada 1 Desember 2023	38
Gambar 3.11 Pertemuan <i>The 84th Meeting of The ASEAN Coordinating Committee on Investment</i> (CCI 84) pada tanggal 26-28 Juli 2023 di Yogyakarta	39
Gambar 3.12 Pertemuan 1st <i>Special CCS</i> on ASFF pada tanggal 3 - 5 April 2023.	41
Gambar 3.13 Pertemuan <i>Preparatory-SEOM</i> for the 29th AEM <i>Retreat Meeting</i> pada tanggal 20 Maret 2023	42
Gambar 3.14 <i>The Fifth ASEAN Economic Ministers' Meeting and Related Meetings</i> (55th AEM) pada tanggal 17 hingga 22 Agustus 2023 di Semarang	43
Gambar 3.15 Pertemuan The ASEAN-EU <i>Joint Working Group for Trade and Investment</i> pada 15 Juni 2023	44
Gambar 3.16 Pertemuan ke-5 ASEAN-China <i>Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy</i> (ACFTA WGDE) pada 25-29 Oktober 2023	46
Gambar 3.17 Pertemuan Ke-6 <i>Working Group on E-Commerce</i> ACAFTA (WGEC ACAFTA)	48
Gambar 3.18 Pertemuan Perundingan <i>Joint Statement Initiative on Electronic Commerce</i> atau JSI <i>E-Commerce</i> WTO pada 25-27 Oktober 2023	50
Gambar 3.19 Direktur Perundingan Perdagangan Jasa menyampaikan paparan pada <i>the 3rd Senior Officials Meeting</i> , APEC pada 6 agustus 2023	51
Gambar 3.20 Pertemuan Klaster <i>Digital Economy Indo Pacific Economic Framework</i> (IPEF) for Prosperity di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 9-12 November 2023.....	53
Gambar 3.21 FGD Indonesia-EU CEPA, Surakarta 26 Januari 2023	66

Gambar 3.22 FGD Perkembangan Perjanjian IK-CEPA Sektor Perdagangan Jasa, Malang 14 Februari 2023	67
Gambar 3.23 FGD Hambatan Investasi dan Perdagangan Jasa dalam Ekonomi Indonesia, Yogjakarta 9 Maret 2023.....	68
Gambar 3.24 Konsultasi Teknis Pemanfaatan Persetujuan IUAE-CEPA Sektor Perdagangan Jasa dan Digital, Surabaya 3 Mei 2023	70
Gambar 3.25 Konsultasi Teknis Perdagangan Jasa dalam Perjanjian Perdagangan Internasional, Cirebon 4 Agustus 2023	71



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012). Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja.

1.2 TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat dalam satu tahun anggaran 2023. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

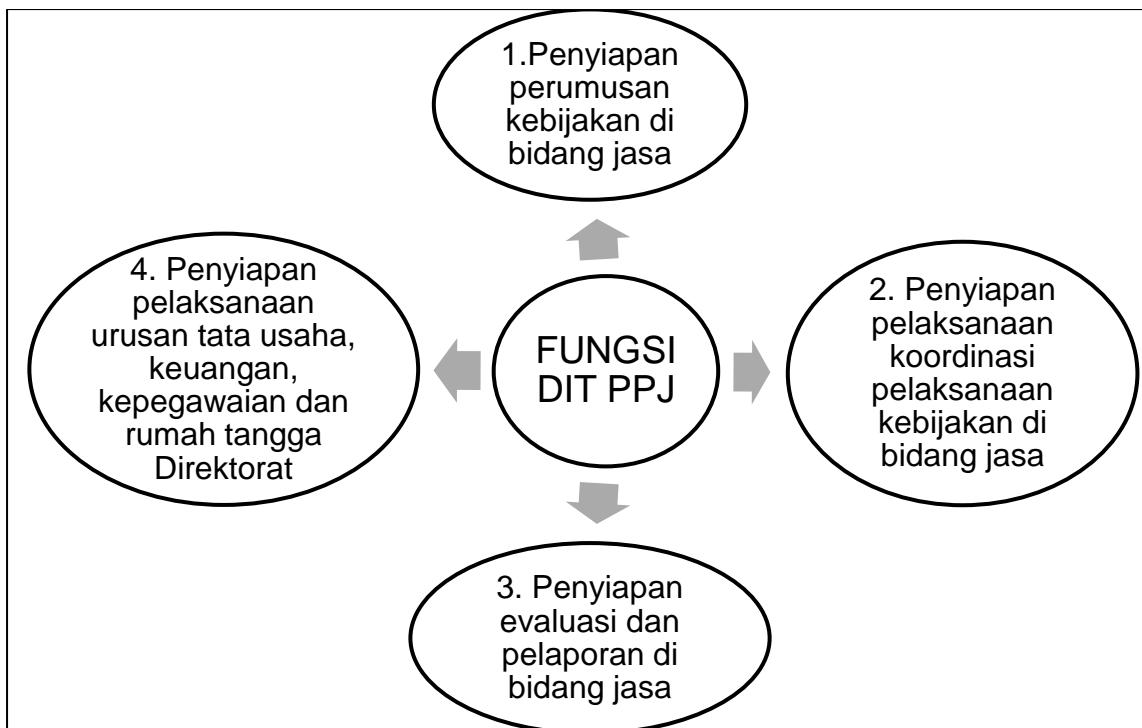
Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2023. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa secara berkala turut memberikan input atas penyampaian laporan-laporan Ditjen PPI kepada Menteri Perdagangan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa mempunyai tugas “Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perundingan perdagangan jasa”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa mempunyai fungsi sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

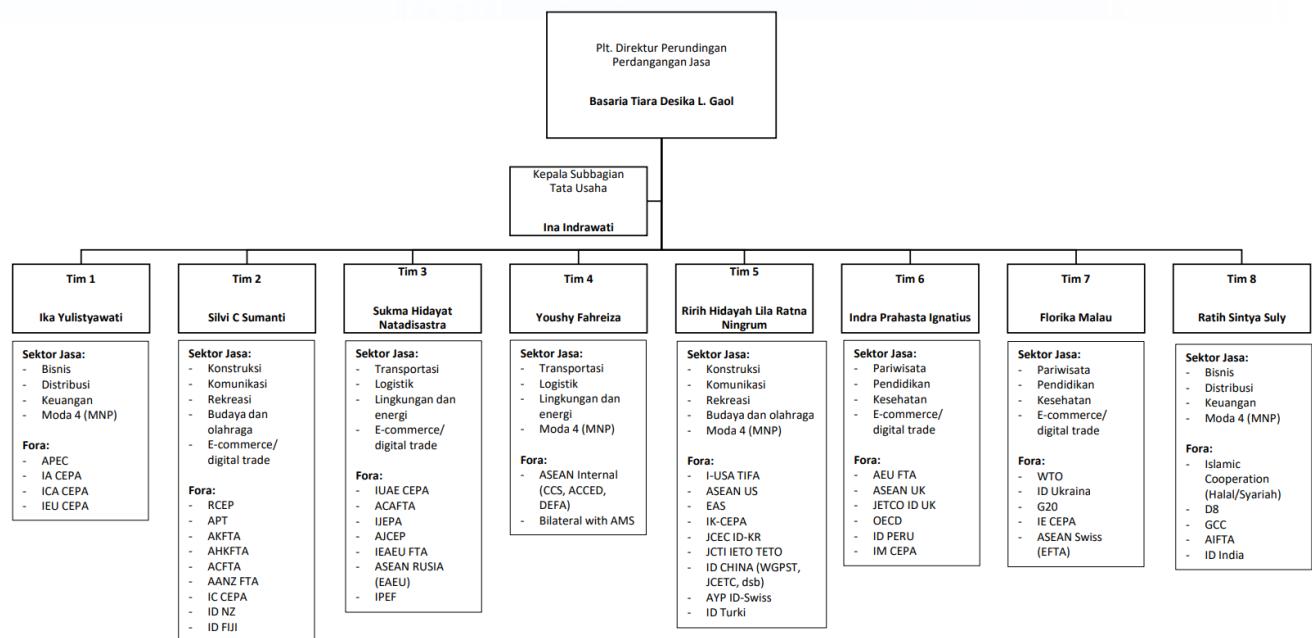
Gambar 1.1
Fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa



Bidang jasa yang dinaungi oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dibagi secara struktur organisasi ke dalam 12 sektor jasa yaitu sektor jasa ; 1) bisnis, 2) distribusi, 3) keuangan, 4) konstruksi, 5) pariwisata, 6) rekreasi, budaya dan olahraga, 7) pendidikan, 8) kesehatan, 9) komunikasi, 10) lingkungan dan energi, 11) transportasi dan 12) logistik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa mempunyai 8 (delapan) tim kerja dan 1 (satu) sub. bagian tata usaha.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2024



Sumber : Dit PPJ, Kemendag

Kedelapan Tim Kerja dalam DPPJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang jasa dan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani

Sub. bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga Direktorat. Secara lebih terperinci, struktur organisasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa disampaikan dalam lampiran II.

1.4 PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Saat ini perkembangan perekonomian dunia sangatlah cepat sehingga Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan berpartisipasi aktif dalam forum internasional dan meningkatkan posisi runding baik dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang dan jasa, dilakukan *multitrack strategy* di fora multilateral, regional, dan bilateral. Melalui *multitrack strategy* ini, Indonesia telah memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik multilateral, yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (WTO); regional, yang terfokus pada ASEAN dan APEC; dan bilateral, yang berorientasi pada penjajakan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership* (CEPA) dan *Free Trade Agreement* (FTA).

Pada tahun 2023, Indonesia senantiasa memperkuat perundingan perdagangan jasa di berbagai fora internasional diantaranya:

1. Pada fora perundingan bilateral, DPPJ melaksanakan perundingan diantaranya adalah: Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJ EPA), Indonesia – Mercosure *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IM CEPA), Indonesia – Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA), Indonesia – Korea *Comprehensive Partnership Agreement* (IK CEPA), Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA), Indonesia – Chile *Comprehensive Partnership Agreement* (IC CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) *Free Trade Agreement*, dan Indonesia-Canada CEPA (ICAN CEPA).
2. Pada fora perundingan regional, DPPJ telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah: Asia Pacific *Economic Cooperation - The Group on Services* (APEC-GOS), ASEAN *Coordinating Committee on Service* (ASEAN CCS), *Joint Working Group ASEAN – European Union* (JWG ASEAN – EU), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), *Upgrading ASEAN – Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZ FTA), dan ASEAN-Canada *Free Trade Agreement*.

3. Pada fora perundingan multilateral, DPPJ telah memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan turut berpartisipasi dalam forum JSI on E-Commerce sejak tahun 2019. Pembahasan JSI on E-Commerce di WTO terdapat pada sektor barang dan jasa sehingga perlu melibatkan DPOPD dan DPPJ. Untuk bidang jasa terdapat beberapa proposal dari negara mitra untuk perluasan akses pasar di beberapa sektor jasa, maka hal ini perlu terus diperhatikan dan diikuti perkembangannya. Pemahaman yang dimiliki Indonesia dan beberapa negara anggota lain adalah pembahasan terkait dengan akses pasar sektor jasa secara multilateral seharusnya dibahas pada forum *Committee on Trade in Services* WTO yang sudah melakukan pembahasan akses pasar sektor jasa pada beberapa putaran sebelumnya seperti Doha Round (2001) dan Hongkong Round (2005), dimana DPPJ juga ikut berpartisipasi pada forum dimaksud. Selain itu, DPPJ juga terlibat pada pertemuan aksesi beberapa negara untuk menjadi anggota WTO seperti Uzbekistan dan Timor Leste. Pada forum aksesi dimaksud, DPPJ juga menyampaikan *request* pembukaan akses pasar sektor jasa untuk kepentingan nasional.

1.5 ISU STRATEGIS

Pada tahun 2023, Indonesia fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral dan menjadi tuan rumah atau ASEAN *Chairmanship*. Pada fora ASEAN, selama keketuaan Indonesia di ASEAN, Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah ASEAN dengan mengangkat tema "**ASEAN Matters: Epicentrum of Growth**". Capaian utama Keketuaan Indonesia di ASEAN sampai dengan adalah penyelenggaraan The 55th ASEAN *Economic Ministers (AEM) Meeting and Related Meetings* pada tanggal 17 - 22 Agustus 2023. Pertemuan ini adalah momentum bersejarah bagi Indonesia, karena pada pertemuan ini lima dari tujuh *Priority Economic Deliverables (PED)* ASEAN selama masa kepemimpinan Indonesia, telah sepenuhnya disetujui dan diselesaikan. PED pertama, yaitu adanya kesimpulan yang dihasilkan dari the ASEAN services *facilitation framework* (ASFF). Kedua, pengesahan pernyataan para pemimpin tentang *the digital economic framework agreement (DEFA)*. Ketiga, penandatanganan protokol kedua amandemen AANZFTA, Australia and New Zealand FTA, yang ditandatangani pada 21 Agustus 2023. Keempat, pengesahan Deklarasi Menteri tentang ASEAN *Industrial Project*

Based Initiative (AIPBI). Kelima, membentuk RCEP Support Unit (RSU) di lingkungan Sekretariat ASEAN pada tahun 2024. Dua PED yang tersisa dan akan diimplementasikan sepenuhnya pada akhir tahun ini, yaitu implementasi penuh E-form D melalui melalui ASW (ASEAN *single window*), dan *roadmap* standar harmonisasi ASEAN, untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Berdasarkan dengan mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan perannya dalam diplomasi dan negosiasi. Tujuan diplomasi ekonomi yang dilakukan mencakup meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam membangun daya saing pada sektor perdagangan diharapkan terpadu dengan baik sehingga dapat mewujudkan satu dari delapan misi pembangunan RPJP tersebut yaitu: “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”.

Arah kebijakan RPJP 2005 – 2025 adalah **”perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat, sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi”**. Upaya yang perlu dilakukan sesuai arah kebijakan tersebut adalah memperkuat posisi nasional di berbagai fora perundingan perdagangan internasional. Program yang diselenggarakan oleh Ditjen PPI dalam rangka melaksanakan upaya tersebut adalah **”Penguatan Perundingan Perdagangan Internasional”**.

Pemerintahan periode 2020–2024 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti dijabarkan dalam: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Trisakti kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan menjadi dokumen perencanaan resmi Pemerintah yang menjadi acuan. Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia hanya akan ada satu Visi di Pemerintahan ini, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga harus memiliki Visi yang sama dan bersatu dalam mewujudkan Visi Pemerintah dimaksud.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong", maka misi pemerintahan periode 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian

Perdagangan Tahun 2020-2024, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengembangkan 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan yaitu “Peningkatan kinerja eksport non-migas dan jasa”, maka Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada tahun 2020 – 2024 memiliki tujuan yaitu:

1. Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional;
2. Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional;
3. Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional; dan

5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Visi, dan misi, serta tujuan tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan RPJP 2005 – 2025 dan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui Program penguatan perundingan perdagangan internasional yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu (i) peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional; (ii) penguatan perundingan perdagangan jasa; (iii) penguatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN; (iv) penguatan perundingan perdagangan bilateral; (v) Penguatan perundingan perdagangan di forum APEC dan Organisasi Internasional; (vi) penguatan perundingan perdagangan multilateral; dan (vii) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PPI.

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dalam tiga sasaran program mencakup: (i) Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional; (ii) Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dan (iii) Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA.

2.2 RENCANA KERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2023 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2023. Rencana Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki 3 Sasaran Kinerja, yaitu:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional
- Sasaran 2 : Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional
- Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional

Selanjutnya 3 (tiga) sasaran tersebut diberikan alokasi anggaran dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pagu Alokasi Anggaran DPPJ

Kegiatan	Alokasi Anggaran
Perundingan Perdagangan Jasa	5.400.000.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

Sebagai turunan dari rencana kerja Ditjen PPI terkait “Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional”, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2022	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional					
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional (Perundingan)	6	20	20	20	20
Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional					
Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	2	10	10	10	20
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	0	4	4	4	4

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2022	2022	2023	2024
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	0	79	81	83	85

Dalam rangka perundingan perdagangan jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun Anggaran 2023 melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dimana secara keseluruhan terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Unit Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Prediksi Capaian (%)			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	20	30	55	75	100
2	Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	3	50	75	85	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Prediksi Capaian (%)			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
	ekspor jasa terhadap perekonomian nasional						
3	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	1	30	75	90	100
		Percentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	83 %	25	50	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2023, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional telah menetapkan 3 sasaran kegiatan dan secara total mencakup 4 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja Dit PPJ disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2023

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran 1 :					
Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional					
1.	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perundingan	20	20	100
Sasaran 2 :					
Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional					
1.	Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
<p>Sasaran 3 :</p> <p>Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional</p>					
1.	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.	Percentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Percentase	83 %	83 %	100

Adapun rata-rata capaian kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa tahun 2023 adalah 100 %.

3.2 SASARAN I :

MENINGKATNYA AKSES PASAR JASA INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

Indikator Kinerja 1 : Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1)

Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2023	2023	2023
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	20 Dokumen	20 Dokumen	100

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N$$

$$= \frac{20}{20} \times 100 = 100\%$$

Indikator Kinerja pertama (IK-1) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa untuk berpartisipasi dalam perundingan perdagangan jasa di forum internasional. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen hasil laporan partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan jasa. Indikator Kinerja Jumlah hasil perundingan perdagangan jasa di berbagai fora

internasional pada tahun 2023 dapat memenuhi target yang ditetapkan dimana pada tahun 2023 ditetapkan target sebanyak 20 fora perundingan dan dapat terealisasi sebanyak 20 fora perundingan sehingga capaiannya sebesar 100 %. Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan adanya peran aktif tim perunding yang mengikuti sidang/perundingan di fora internasional dalam menyampaikan apa yang menjadi komitmen Indonesia serta ikut mendorong tercapainya hasil perundingan yang bermanfaat bagi Indonesia di fora internasional.

Setelah menilaikan target dan realisasi tahun 2023 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian table berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1)
Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	16 Dokumen	20 Dokumen	16 Dokumen	20 Dokumen	100	100

Secara kumulatif berikut adalah 20 fora perundingan yang telah melakukan sidang internasional pada tahun 2023 dalam rangka Peningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional, antara lain.

Perundingan Bilateral

1. Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA)

- Perundingan Putaran Pertama Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA) *Working Group on E-Commerce* tanggal 5 April 2023. Pertemuan membahas *initial draft text Electronic Commerce* usulan EAEU. Indonesia menyampaikan pandangan dan pertanyaan kepada EAEU terhadap beberapa artikel. Diskusi berjalan dengan produktif, dan pada kesempatan ini kedua pihak menyepakati satu artikel.
- Pertemuan Intersesi *Working Group on Cooperation* Indonesia - Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA) pada 7 Juni 2023 dengan agenda pertemuan meliputi *review* atas hasil *draft text Chapter Cooperation* putaran pertama sekaligus membahas teks tersebut lebih lanjut untuk mempersiapkan putaran berikutnya.
- Perundingan Putaran Kedua Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA) *Working Group on E-Commerce* tanggal 25 Juli 2023. Pertemuan membahas *counter proposal text Chapter Electronic Commerce* usulan Indonesia yang telah dikirimkan kepada EAEU pada tanggal 11 Juli 2023. EAEU menyampaikan pandangan dan pertanyaan kepada Indonesia terhadap beberapa artikel. Pada kesempatan ini kedua pihak menyepakati sebagian artikel dalam *counter proposal* dimaksud.
- Perundingan Putaran Ketiga Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (IEAEU FTA) pada 13-15 Desember 2023. DPPJ berpartisipasi dalam Pertemuan *Working Group on Electronic Commerce* pada tanggal 13 Desember 2023. Pada pertemuan ini berhasil menyepakati Artikel *Objectives* serta beberapa paragraf dalam beberapa artikel.

Gambar 3.1

Perundingan Putaran Ketiga IEAEU FTA pada 13-15 Desember 2023



2. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)

- Pertemuan dengan pihak *Ministry of Trade, Industry and Energy* (MOTIE) Korea Selatan pada 20 Juli 2023 membahas proposal Indonesia atas kerja sama *Movement of Natural Persons* (MNP) dalam kerangka Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA).
- Pertemuan pembahasan proposal kerja sama MNP dalam kerangka IK-CEPA dengan *Ministry of Trade, Industry, and Energy* (MOTIE) Korea Selatan pada 5 September 2023. Pertemuan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan IK-CEPA melalui usulan pembentukan skema fasilitasi guna mempermudah akses tenaga kerja profesional Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan. Indonesia sangat mengapresiasi keterbukaan Korea Selatan untuk mendiskusikan proposal ini, mempertimbangkan bahwa Korea Selatan belum pernah memberikan skema fasilitasi terkait MNP dengan negara mitra nya.
- Dalam rangka implementasi Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau IK-CEPA sejak 1 Januari 2023, Indonesia dan Korea melakukan rangkaian pertemuan pertama Komite Bersama (*The First Joint Committee Meeting*) pada 11-12 Desember 2023. Pertemuan dilakukan untuk membahas perkembangan implementasi serta menyelesaikan isu-isu yang terjadi selama implementasi IK-CEPA. Pada pertemuan tersebut, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa selaku *Lead* Indonesia pada *Committee on*

Trade in Services and Investment (TSI) IK-CEPA menyampaikan beberapa isu yang menjadi *concern* Indonesia untuk dapat dibahas pada pertemuan TSI, diantaranya terkait dengan *Proposal Special Scheme for Professionals*, usulan skema *Working Holiday Visa* (WHV) Indonesia-Korea, pembentukan *Working Group on Movement of Natural Persons* (WG MNP), serta dorongan investasi Korea ke Indonesia pada sektor industri produk susu.

Gambar 3.2

**Pertemuan pertama Komite Bersama (*The First Joint Committee Meeting*)
pada 11-12 Desember 2023**



3. Indonesia - Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)

- Perundingan putaran ke-4 Indonesia-Canada CEPA 16-17 Februari 2023, pembahasan terkait *Chapter E-Commerce* dan *Chapter/Annex Telecommunication*. Perundingan berjalan konstruktif dan kedua pihak menyepakati sejumlah teks pada artikel dalam *Chapter E-Commerce* dan *Chapter/Annex Telecommunication*.
- *Working Group on Trade in Services* (WGTIS) perundingan Indonesia-Canada CEPA (ICACEPA) pada 20-24 Februari 2023 melanjutkan pelaksanaan putaran ke-4 yang membahas *Chapter/Annex on Financial Services*, *Chapter on Trade in Services/Cross-border Trade in Services*, dan *Chapter on Temporary Movement of Natural Persons*.

- WG TiS pada perundingan ICA CEPA putaran ke-5 di Ottawa, Canada dilaksanakan pada 29 Mei - 2 Juni 2023. Pertemuan ini fokus membahas teks pada *Chapter Trade in Services/Cross Border Trade in Services*, *Chapter Temporary Movement of Natural Persons*, *Annex/Chapter Telecommunications*, *Annex/Chapter Financial Services* dan *Chapter E-Commerce*. Selain itu, Indonesia berkesempatan mempresentasikan regulasi terkait impor produk digital.
- Perundingan Putaran ke-6 Indonesia-Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA) pada *Working Group-Trade in Services* pada 23-27 Oktober 2023. Perundingan membahas sejumlah draft teks yang meliputi *Chapter Electronic Commerce*, *Chapter/Annex Telecommunications*, *Chapter Financial Services*, *Chapter Cross Border Trade in Services/Trade in Services*, dan *Chapter Temporary Movement of Natural Persons*. Perundingan berjalan konstruktif dengan disepakatinya sejumlah bagian teks dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perundingan tahun 2024 sesuai dengan arahan dari kedua kepala negara.

Gambar 3.3

WG TiS pada perundingan ICA CEPA putaran ke-5 di Ottawa, Canada



4. Indonesia - Chile *Comprehensive Partnership Agreement* (IC-CEPA)

- *The 1st Joint Commission Meeting* untuk Perjanjian Indonesia-Chile CEPA dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023. Diantara pembahasan yang diagendakan, kedua negara menyampaikan perkembangan proses ratifikasi untuk protokol perubahan Perjanjian IC-CEPA untuk Perdagangan Jasa.

Sebagai informasi, pada tanggal 4 September 2023 DPR RI melalui Komisi VI telah menetapkan bahwa proses ratifikasi protokol perubahan Perjanjian IC-CEPA Perdagangan Jasa dapat disahkan melalui Peraturan Presiden.

Gambar 3.4
The 1st Joint Commission Meeting untuk Perjanjian
Indonesia-Chile CEPA



5. Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

- Pertemuan Intersesi Indonesia-EU CEPA terkait *Title Digital Trade/E-Commerce* dilaksanakan pada 25 Januari 2023. Tujuan pertemuan adalah untuk melanjutkan penjelasan Indonesia mengenai usulan pada beberapa artikel dan persiapan perundingan putaran ke-13 yang akan dilaksanakan pada 6-11 Februari 2023.
- Perundingan putaran ke-13 *Working Group Trade in Services* (WGTIS) Indonesia-EU CEPA pada tanggal 6-11 Februari 2023 yang membahas berbagai isu pending terkait MRA, *international maritime transport services*, *temporary presence of natural persons for business purposes*, *digital trade/e-commerce* dan *cross-cutting investment and trade in services*.
- Pertemuan Intersesi *Section Delivery Services* Perundingan I-EU CEPA pada 27 Maret 2023. Pertemuan berfokus membahas article mengenai *Prevention of Market Distortive Practices* dan berupaya untuk mencapai kesepakatan pada artikel ini.

- Pertemuan Intersesi *Guidelines for Arrangements on the Mutual Recognition of Professional Qualifications* Perundingan I-EU CEPA pada 17 April 2023. Pertemuan berfokus pada penjelasan dan klarifikasi atas *Guidelines MRA* yang diusulkan oleh EU untuk dirundingkan lebih lanjut pada Perundingan Putaran ke-14 di Brussels, Belgia.
- Perundingan putaran ke-14 Indonesia-EU CEPA dilaksanakan di Brussels, Belgia pada tanggal 8-12 Mei 2023. Pada putaran kali ini, kedua pihak melanjutkan pembahasan teks *mutual recognition agreement* (MRA), *international maritime services*, *digital trade/e-commerce*, *temporary presence of natural persons for business purposes*, *delivery services*, dan *domestic regulation*. Pertemuan juga membahas *guideline MRA* dan akses pasar sektor jasa. Secara umum, pertemuan berjalan kondusif dan konstruktif dengan disepakatinya sejumlah teks perjanjian. Beberapa isu masih belum mencapai kesepakatan karena perbedaan rezim kedua pihak. Pembahasan akan dilanjutkan baik pada pertemuan intersesi maupun putaran selanjutnya hingga mencapai kesepakatan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak.
- WG TiS Perundingan Indonesia-EU CEPA putaran ke-15 dilaksanakan di Yogyakarta pada 10-14 Juli. Pertemuan berjalan konstruktif untuk menyelesaikan isu-isu pada teks perjanjian *Domestic Regulation*, *Temporary Presence of Natural Person for Business Purposes* (TPNPBP), *Delivery Services*, MRA, *Maritime Transport*, dan *Digital Trade/E-Commerce*. Pertemuan juga melanjutkan pembahasan akses pasar dengan masing-masing pihak mengindikasikan adanya peningkatan komitmen dalam *revised offer*.
- Perundingan Indonesia-EU CEPA putaran ke-16 di Brussels, Belgia pada 4-8 Desember 2023. Perundingan putaran ke-16 membahas draft teks yaitu *Title Digital Trade/E-Commerce*, *Article Computer Services*, *Section Domestic Regulation*, *Section Delivery Services*, *Article MRA*, *Annex MRA Guidelines*, *Section Maritime Transport*, *Chapter Temporary Presence of Natural Persons for Business Purposes*, dan akses pasar jasa.

Gambar 3.5
Perundingan Indonesia-EU CEPA putaran ke-16
di Brussels, Belgia pada 4-8 Desember 2023



6. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

- Pertemuan intersesi *Sub-Committee on Trade in Services (SC-TIS)* IJEPA pada 12 Januari 2023 dilaksanakan dengan pembahasan terkait isu *e-commerce*.
- Pertemuan Intersesi *Sub-Committee on Trade in Services (SC-TIS)* IJEPA dilaksanakan pada 10-11 April 2023, pembahasan terkait *market access*, *capacity building*, dan teks *e-commerce*.
- Pertemuan Intersesi *Sub-Committee on Trade in Services (SC-TIS)* IJEPA dilaksanakan pada 16 Juni 2023 dengan pembahasan terkait teks *e-commerce*, *market access*, dan *capacity building*.
- Pertemuan *Intersesi Sub-Committee on Trade in Services (SC-TIS)* IJEPA pada 18 Juli 2023 merupakan tindak lanjut dari Pertemuan JCM IJEPA ke-18 yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023. Pada pertemuan ini, Indonesia menyampaikan tanggapan atas beberapa pertanyaan Jepang mengenai *counter proposal* Indonesia pada teks *e-commerce*.
- Pertemuan intersesi *Sub-Committee on Trade in Services (SC-TIS)* IJEPA pada tanggal 2 Agustus 2023 merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023. Pada pertemuan ini, Indonesia menyampaikan tanggapan atas beberapa pertanyaan tambahan Jepang terkait *counter proposal* Indonesia pada teks *e-commerce*. Kedua pihak sepakat untuk

melanjutkan pembahasan e-commerce pada tanggal 14 Agustus 2023 di Jakarta.

- Pertemuan intersesi *Sub-Committee on Trade in Services* (SC-TIS) IJEPA dilaksanakan di Kementerian Perdagangan Jakarta pada 14 Agustus 2023. Pertemuan ini melanjutkan pembahasan *draft text electronic commerce* yang diusulkan Jepang. Kedua pihak berhasil menyepakati beberapa artikel yaitu, *Scope*, *Definitions*, dan *Cooperation*. Sementara untuk artikel lainnya, kedua Pihak masih memerlukan waktu untuk dapat menemukan kesepakatan.
- Pertemuan *Chief Negotiator* Perundingan Protokol Perubahan IJEPA dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pertemuan tersebut membahas isu-isu dalam e-commerce yang belum dapat disepakati. Dalam pembahasan tersebut, Indonesia menyampaikan proposal kepada Jepang sebagai solusi dalam upaya menyelesaikan perundingan.
- Pertemuan *Chief Negotiator* Perundingan Protokol Perubahan IJEPA pada tanggal 28 Agustus 2023. Pertemuan berhasil menyepakati teks *Chapter on E-commerce*. Sebagai tindak lanjut, Kedua Pihak akan menyiapkan proses *legal scrubbing* atas keseluruhan teks yang telah disepakati.

Gambar 3.6

Pertemuan Chief Negotiator Perundingan Protokol Perubahan IJEPA pada tanggal 23 Agustus 2023



7. Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

- Pertemuan Pembahasan *Review Trade in Services* (TiS) Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA) dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023. Pertemuan ini

bertujuan membahas persiapan *Review Pertama Chapter TiS IA-CEPA* yang akan dimulai pada tahun 2023. Adapun agenda yang dibahas, yaitu: i) *MoU on Skills Exchange*; ii) *MoU on Workplace Based Training*; iii) *Draft Paper Jasa Keuangan*; iv) *Strategi Review Chapter TiS*; dan iv) *Side Letter on Working Holiday Visa, Article Cooperation Chapter E-commerce, dan Chapter Telecommunications*.

- Pertemuan pertama *skills development exchange* IACEPA dilaksanakan pada 3 April 2023 yang membahas hasil survey yang dilakukan Katalis, hasil konsultasi domestik dengan *business peak bodies* Indonesia dan Australia, serta rencana pertemuan berikutnya. *MoU* disusun untuk memfasilitasi pergerakan tenaga profesional di antara kedua negara pada sektor-sektor tertentu dengan pengaturan *occupations*, ketenagakerjaan, dan keimigrasian yang berlaku. *MoU* ini juga melibatkan secara erat pihak swasta dan *business peak bodies* yang diharapkan dapat mendorong pemanfaatan *MoU* secara optimal.
- Pertemuan ke-2 *Committee on Trade in Services* (CTS) Indonesia-Australia CEPA dilaksanakan di Canberra pada 7-8 Juni 2023. Dalam rangkaian pertemuan, dilakukan beberapa kelanjutan pembahasan yaitu: 1) *professional services working group* ke-2, yang membahas *interest ID* untuk MRA *architect* dan *nursing*, serta *updating work program*, 2) kelanjutan pembahasan *review Skills Development Exchange* (SDE), dan 3) isu pada CTS yaitu *scoping paper review chapter TiS*, *jasa keuangan*, *telekomunikasi*, *e-commerce*, serta *mobilitas profesional* termasuk *work and holiday maker*, *workplace based training*, serta komitmen kategori *contractual service suppliers*.
- Pertemuan lanjutan pembahasan Reviu *MoU on Skills Development Exchange Pilot Project* dilaksanakan pada kerangka IACEPA pada 21 Juni 2023. Pada pertemuan ini menyepakati beberapa isu dan masih diperlukannya pembahasan lebih lanjut antara lain mengenai: cakupan sektor *MoU*, persyaratan bagi *sending organization* di Indonesia, pelaksanaan penandatanganan, dan isu lainnya. Kedua pihak sepakat untuk memfinalisasi pembahasan sebelum penandatanganan *MoU* yang direncanakan akhir bulan Juni 2023.

- Pertemuan terkait pembahasan Reviu MoU *on Skills Development Exchange Pilot Project* pada kerangka IACEPA dilaksanakan pada 23 Juni 2023. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Rabu (21/6) untuk memfinalisasi pembahasan sebelum penandatanganan MoU yang direncanakan pada akhir bulan Juni 2023.
- Pertemuan terkait pembahasan perkembangan reviu *MoU Skill Development Exchange (SDE)* dilaksanakan dalam kerangka IACEPA pada 4 Juli 2023. Pertemuan membahas rencana legal scrubbing naskah MoU yang telah selesai dinegosiasikan dengan pihak DFAT Australia pada Juni 2023.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* Indonesia - Australia *Skills Development Exchange Pilot* yang dilaksanakan di Kantor Kemnaker, Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2023. Dalam hal penandatanganan, Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Kemnaker dan Australia diwakili oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia. Implementasi perubahan MoU antara lain meliputi penambahan sektor cakupan MoU seperti jasa pariwisata, ekonomi kreatif, dan agribisnis, serta penambahan durasi pelaksanaan pertukaran sampai dengan maksimal 12 bulan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Gambar 3.7

Penandatanganan MoU as amended on the Indonesia - Australia Skills Development Exchange Pilot di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2023



Perundingan Regional

1. ASEAN Australia New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA)

- Proses *upgrading* AANZFTA telah memasuki tahap finalisasi perundingan untuk isu-isu spesifik yang ada, dan DPPJ selaku *vocal point* isu jasa hadir secara langsung sebagai Delegasi RI dalam pertemuan AANZFTA *Joint Committee* dan sesi *legal scrubbing* dalam *Working Group on Legal and Institutional Issues* (WGLII) serta pertemuan COI secara virtual pada tanggal 14-17 Februari 2023. Pertemuan ini dilaksanakan guna menyelesaikan proses perundingan seluruh isu pada tahun ini.
- Pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Selandia Baru dalam kerangka Upgrading AANZFTA untuk membahas akses pasar sektor jasa dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023, yang menjadi suatu langkah yang besar untuk mencapai kesepakatan bagi kedua negara terkait komitmen perdagangan jasa.

Gambar 3.8

Proses upgrading AANZFTA telah memasuki tahap finalisasi perundingan untuk isu-isu spesifik yang ada pada tanggal 14-17 Februari 2023



2. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

- Pertemuan ke-4 RCEP *Joint Committee* diselenggarakan tanggal 16-19 Juli 2023 di Surabaya, Indonesia. RCEP merupakan kerjasama ekonomi Mega-FTA regional antara negara-negara anggota ASEAN dengan 5 negara mitranya (Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru). Pertemuan mengangkat beberapa pokok pembahasan yang akan dilaporkan kepada para Menteri RCEP dalam Pertemuan ke-2 RCEP Ministers tanggal 22 Agustus mendatang di Semarang, Indonesia.

Gambar 3.9
Pertemuan ke-4 RCEP Joint Committee
tanggal 16-19 Juli 2023 di Surabaya, Indonesia



3. ASEAN *Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee* (DEFA NC)

- Pertemuan pertama *the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee* (DEFA NC) yang dilakukan secara *hybrid* oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan di Jakarta pada 1 Desember 2023. Salah satu agenda utama Pertemuan adalah membahas prinsip, pendekatan, serta struktur negosiasi terhadap teks DEFA yang ditargetkan akan selesai dibahas pada akhir 2025. Negara anggota ASEAN memberikan pandangan awal terhadap teks DEFA dan menyepakati perlunya *capacity building* kepada para negosiator untuk memahami isu-isu yang ada dalam teks DEFA.

Gambar 3.10

Pertemuan pertama the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) di Jakarta pada 1 Desember 2023



4. ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI)

- *Special Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Investment* yang diselenggarakan pada 3 Juli 2023 melalui *video conference*. Beberapa agenda dibahas dalam pertemuan ini diantaranya *Fifth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, *Preparation for the ASEAN Investment Policy Brief* dan *Preparation for the ASEAN Investment Forum*.
- Pertemuan *The 84th Meeting of The ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI 84)* pada tanggal 26-28 Juli 2023 di Yogyakarta. Beberapa agenda penting yang dibahas dalam pertemuan ini diantaranya mengenai Penyusunan *The Fifth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, Penyusunan *ASEAN Investment Report (AIR) 2023* dan Penyelenggaraan *ASEAN Investment Forum* dalam rangka Keketuaan ASEAN 2023.
- Pertemuan ke-2 *Special ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI)* yang dilakukan secara *hybrid* oleh Kementerian Investasi/BKPM di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 30 November – 1 Desember 2023. Salah satu agenda utama Pertemuan adalah melakukan *legal scrubbing* teks *5th Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang direncanakan akan ditandatangani pada Pertemuan ASEAN *Economic*

Ministers (AEM) tahun 2024. Selain itu, isu lain yang dibahas pada Pertemuan tersebut adalah CCI's 2024 *Annual Priorities* dan agenda AEC Post-2025.

Gambar 3.11

Pertemuan *The 84th Meeting of The ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI 84)* pada tanggal 26-28 Juli 2023 di Yogyakarta



5. ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)

- Pertemuan *Coordinating Committee on Services (CCS)* ke-103 diselenggarakan tanggal 28 Februari 2023- 2 Maret 2023 di Bangkok, Thailand. Agenda yang dibahas antara lain pembahasan notifikasi AFAS kepada WTO, persiapan *Non-Conforming Measures (NCMs)* ASEAN *Trade in Services Agreement (ATISA)* , ASEAN *Services Facilitation Framework (ASFF)*, CCS *Work Programme* sampai dengan 2025 dan laporan dari working group yaitu *Business Services (BSSWG)*, *Healthcare Services (HSSWG)*.
- Pertemuan *First Special Meeting of the Coordinating Committee on Services on ASEAN Services Facilitation Framework (1st Special CCS on ASFF)* yang diselenggarakan tanggal 3 - 5 April 2023 secara virtual. Agenda yang dibahas antara lain ASFF *Draft Text*, ASFF *Workplan* dan *Operasionalisation of ASFF*. ASFF mengadopsi berbagai elemen/disiplin dari teks *Agreement* atau *Framework* yang ada di regional dan multilateral. Text ASFF ditargetkan selesai sebelum Pertemuan AEM 54.
- Pertemuan *Coordinating Committee on Services (CCS)* ke-104 tanggal 17-19 Mei 2023 yang diawali dengan rangkaian pertemuan *working group/subworking*

group sejak tanggal 15 hingga 18 Mei 2023 di Yogyakarta, Indonesia. *Highlight* Pertemuan kali ini adalah *Joint Discussion* dengan ASEAN *Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs* (DGICM) yang membahas hambatan terhadap mobilisasi profesional ASEAN.

- Pertemuan *Second Special Meeting of the Coordinating Committee on Services* (2nd Special CCS) diselenggarakan secara *hybrid* di Singapore pada tanggal 5 – 7 Juli 2023. Agenda yang dibahas menekankan pada penyelesaian *Draft Text ASFF* yang menjadi salah satu *Priority Economic Deliverables* (PED) Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai ATISA dan MNP *Milestone Paper*.
- Pertemuan *Third Special Meeting of the Coordinating Committee on Services* (3rd Special CCS) diselenggarakan secara *hybrid* di Lao PDR pada tanggal 7 Agustus – 9 Agustus 2023. Pertemuan tersebut berhasil menyepakati *Draft Text ASEAN Services Facilitation Framework* (ASFF) yang menjadi salah satu *Priority Economic Deliverables* (PED) Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini dan akan dicatat pada pertemuan Menteri - Menteri Ekonomi Negara ASEAN ke-55 di Semarang pada tanggal 19 Agustus 2023.
- Pertemuan *The Legal Scrubbing Text of ASFF* secara virtual dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 yang bertujuan untuk membahas teks ASFF tersebut dari sisi hukum. Pertemuan tersebut dihadiri oleh ahli hukum masing-masing negara anggota ASEAN. Dalam hal ini DPPJ didampingi oleh Biro Advokasi Perdagangan.
- Pertemuan *the 15th Meeting for the Committee of the Whole (CoW 15) for ASEAN Economic Community (AEC)*, dan *The HLTF-EI Socialisation Workshop on AEC Post-2025* dilaksanakan pada tanggal 1 - 2 November 2023. Adapun pertemuan membahas *End-Term Review (ETR) of AEC Blueprint 2025*, tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi dalam agenda lintas sektoral, diskusi mengenai status *Annual Priorities (APs)* dari masing-masing *Sectoral Bodies*.

Gambar 3.12

Pertemuan 1st Special CCS on ASFF pada tanggal 3 - 5 April 2023



6. ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM)

- ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 1/54 diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 18 Januari 2023 di Semarang, Jawa Tengah dimana Direktur Perundingan Perdagangan Jasa hadir dalam kapasitasnya sebagai Chair ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) pada Pertemuan Committee of the Whole (COW). Beberapa agenda yang dibahas diantaranya *Priority Economic Deliverables* (PED) Indonesia di bawah Keketuaan ASEAN Tahun 2023, *Annual Priorities* 2023, dan *Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community*. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa merupakan penanggung jawab untuk salah satu PED 2023, yaitu ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF) yang merupakan *framework* kerja sama ASEAN dalam memfasilitasi sektor jasa dalam bidang-bidang seperti peraturan domestik dan transparansi.
- Pertemuan *Preparatory-SEOM for the 29th AEM Retreat Meeting* dengan beberapa agenda yang dibahas diantaranya *Priority Economic Deliverables* (PED) Indonesia di bawah Keketuaan ASEAN Tahun 2023; *Annual Priorities* 2023; dan *Implementing of the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint* 2025 dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023. Dalam Pertemuan AEM *Retreat*, para Menteri Ekonomi ASEAN akan mengendorse *Concept Note* salah satu PED Indonesia yaitu ASEAN Services Facilitation Framework

(ASFF) atau kerangka kerja fasilitasi jasa ASEAN yang berada di bawah koordinasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.

- ASEAN *Senior Economic Officials Meeting* dilaksanakan pada tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2023 di ASEAN Secretariat, Jakarta. Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya *Priorities Economic Deliverables* (PED) Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa merupakan penanggung jawab untuk salah satu PED 2023, yaitu ASEAN *Services Facilitation Framework* (ASFF) serta isu penandatanganan *Protocol to Amend the ASEAN MNP Agreement*.
- ASEAN *Senior Economic Officials Meeting* dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 16 Juli 2023 di Surabaya. Beberapa agenda dibahas dalam pertemuan ini diantaranya yaitu *Priorities Economic Deliverables* (PED) Indonesia pada Keketuaan di ASEAN 2023; Penandatanganan ASEAN *Economic Agreement* beserta *instrument*; ASEAN *Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM); dan Konsultasi dengan dialog *partner* seperti the ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) 3.0 *upgrade negotiations* dan *progress* finalisasi ASEAN-China *Initiative on Enhancing Cooperation on E-Commerce*, *Joint Review Study of the ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA), dan perkembangan ASEAN-Canada *Free Trade Area Trade Negotiations* (ACAFTA).

Gambar 3.13

**Pertemuan *Preparatory-SEOM for the 29th AEM Retreat Meeting*
pada tanggal 20 Maret 2023**



7. ASEAN Economic Ministers' Meeting and Related Meetings (AEM)

- *The Fifth ASEAN Economic Ministers' Meeting and Related Meetings* (55th AEM) dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 22 Agustus 2023 di Semarang. Sebanyak lima dari tujuh *Priority Economic Deliverables* (PED) Indonesia di bawah Keketuaan ASEAN Tahun 2023 berhasil diselesaikan. Salah satunya yaitu penyelesaian draft text *ASEAN Services Facilitation Framework* (ASFF) atau kerangka kerja fasilitasi jasa ASEAN yang berada di bawah koordinasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa. Empat PED lainnya yang berhasil diselesaikan diantaranya pengesahan studi terkait Persetujuan Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (*The ASEAN Digital Economy Framework Agreement /DEFA*); Penandatanganan Perjanjian Protokol Kedua Perubahan dalam Kerangka ASEAN Australia Selandia Baru Area Perdagangan Bebas (*The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area/AANZFTA*); Pengesahan Deklarasi Menteri terkait Kerangka Kerja Inisiatif Industri berbasis Proyek di ASEAN (*ASEAN Framework on Industrial Project-Based Initiative*); serta Pengesahan Kerangka Acuan Kerja (TOR) Pembentukan Unit Pendukung *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di Sekretariat ASEAN.

Gambar 3.14

The Fifth ASEAN Economic Ministers' Meeting and Related Meetings (55th AEM) pada tanggal 17 hingga 22 Agustus 2023 di Semarang



8. *The ASEAN-EU Joint Working Group for Trade and Investment*

- Pertemuan *The ASEAN-EU Joint Working Group for Trade and Investment* diselenggarakan secara virtual pada 15 Juni 2023. Agenda yang dibahas diantaranya *Sectoral Cooperation Related to Digital Trade and The Digital Economy, Sectoral Cooperation Related to Sustainable Development Including Green Technologies and Green Services* dan *Sectoral Cooperation Related to Resilient, Efficient and Sustainable Supply Chains*. Selain kerja sama pada bidang *Digital Economy; Green Technology and Green Services* dan *Supply Chain Resilience*, *Joint Working Group* tersebut diharapkan juga mempertimbangkan prioritas lain seperti integrasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Gambar 3.15

Pertemuan The ASEAN-EU Joint Working Group for Trade and Investment pada 15 Juni 2023



9. *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*

- Pertemuan kedua WGDE telah dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2023, yang diawali dengan ASEAN Caucus sebagai sarana pertemuan internal bagi negara anggota ASEAN untuk mengkonsolidasikan posisi bersama. Kemudian hari berikutnya, Selasa 30 Mei 2023 dilanjutkan dengan sesi *plenary* antara ASEAN dan China, dimana pembahasan dititikberatkan pada diskusi mengenai draft text WGDE, dan persiapan pertemuan *the third ACFTA 3.0 upgrade*

negotiation and 16 ACFTA Joint Committee Meeting tanggal 24-27 Juni 2023 di Kunming, Yunnan, China.

- Pertemuan Ketiga ASEAN-China *Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy* (ACFTA WGDE) dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2023. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian *3rd Round of ACFTA 3.0 Upgrade Negotiation and Related Meetings* yang dilaksanakan secara fisik di Kunming, Yunnan, China. Agenda utama pertemuan yaitu melanjutkan pembahasan *draft text Digital Economy Chapter* yang diusulkan China. Pertemuan diawali dengan sesi *Caucus* yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN. Pada sesi *Plenary*, baik ASEAN maupun China bertukar pandangan dan informasi atas isu-isu yang diatur dalam draft text. Kedua pihak berkomitmen untuk memaksimalkan jalannya perundingan guna mencapai target penyelesaian 50% teks pada akhir 2023.
- Pertemuan ACFTA WGDE telah mencapai putaran ke-4 yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 September 2023 secara daring. Isu ekonomi digital dibahas melalui *Working Group on Digital Economy* (WGDE). Seluruh Pihak berusaha semaksimal mungkin untuk menyepakati isu-isu dalam ekonomi digital, mengingat perundingan *Upgrading ACFTA* diharapkan selesai pada tahun 2024.
- Pertemuan *Caucus Pertama* menjelang Pertemuan ke-5 ASEAN-China *Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy* (ACFTA WGDE) dilaksanakan pada 5 Oktober 2023. Pertemuan ke-5 ACFTA WGDE ini dilaksanakan *back to back* dengan Pertemuan ke-4 ACFTA 3.0 *Upgrade Negotiations and Related Meetings* yang akan diselenggarakan di Bandung tanggal 25-29 Oktober 2023. *Caucus Pertama* ini bertujuan agar ASEAN dapat mencapai konsensus terhadap berbagai isu yang perlu ditindak lanjuti dan disampaikan kepada China sebelum Pertemuan ke-5 ACFTA WGDE yang akan datang.
- Pertemuan ke-5 ASEAN-China *Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy* (ACFTA WGDE) pada 25-29 Oktober 2023 di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan dimaksud merupakan rangkaian dari Pertemuan ke-4 ACFTA 3.0 *Upgrade Negotiations and Related Meetings* yang dihadiri oleh

seluruh negara anggota ASEAN dan China, baik secara luring maupun daring. Sesi *Caucus* dan *Plenary* yang membahas beberapa isu spesifik yang telah berhasil disepakati. Lebih lanjut, ASEAN dan China berkomitmen untuk memaksimalkan komunikasi secara intersesi guna mencapai target penyelesaian di tahun 2024.

Gambar 3.16

Pertemuan ke-5 ASEAN-China *Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy* (ACFTA WGDE) pada 25-29 Oktober 2023



10. ASEAN-Canada *Free Trade Agreement* (ACAFTA)

- Pertemuan *Caucus* yang diadakan secara *hybrid* di Bangkok, Thailand pada tanggal 3 Maret 2023, dan dihadiri oleh seluruh anggota negara ASEAN. Pertemuan membahas terkait *counterproposal text* dari Canada untuk *Chapter TIS* dan *TMNP*. Selain itu, AMS juga membahas level ambisi terkait struktur teks dan pendekatan *scheduling* yg akan digunakan sebagai posisi ASEAN.
- Pertemuan ke-3 *Working Group on Trade in Services* ACAFTA dilaksanakan pada tanggal 27 dan 29 Maret 2023. Agenda pertemuan ini adalah membahas *counter proposal* Canada untuk teks *TMNP* dan *TIS*. Kedua pihak saling memberikan penjelasan dan pandangan di setiap artikel yang diusulkan.
- Pertemuan Keempat *Working Group on Electronic Commerce* ASEAN-Canada *Free Trade Agreement* (WGEC ACAFTA) dilaksanakan pada 14-15 Agustus 2023. Pertemuan diawali dengan ASEAN *Caucus* dan dilanjutkan *Plenary*. Agenda pertemuan membahas *draft text Chapter E-Commerce* usulan Canada. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN menyampaikan beberapa usulan

artikel tambahan pada *draft text* tersebut dan menyetujui beberapa artikel usulan Canada. Sebagai tindak lanjut, ASEAN akan mengirimkan *counterproposal* dimaksud pada 15 September 2023.

- Pertemuan ASEAN-Canada FTA di Bali pada 25-29 September 2023. Dalam Pertemuan tersebut, DPPJ berpartisipasi dalam Pertemuan Kelima *Working Group on Electronic Commerce* (WGEC) dan *Working Group on Trade in Services* pada ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). Pertemuan WGEC dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2023 dengan agenda membahas *counterproposal* dari ASEAN terhadap teks Canada untuk sembilan artikel dalam *Chapter Electronic Commerce*. Pertemuan ini menyepakati 1 artikel, yaitu Artikel *Cybersecurity*. Pertemuan WGTIS dilaksanakan pada tanggal 25-29 September 2023 dengan agenda sesi presentasi peraturan domestik ketenagakerjaan dan imigrasi masing-masing negara, pembahasan draf teks TIS/CBTS, TMNP/TMBP, *Annex DAM*, dan *Annex Professional Services*. Kedua pihak berhasil menyepakati judul *chapter* TMNP yang merupakan usulan dari ASEAN dan 6 dari 10 artikel di dalamnya. Untuk pembahasan draf teks TIS/CBTS, masih terdapat perbedaan pandangan terkait struktur *chapter* dan *scheduling approach*.
- Pertemuan Ke-6 *Working Group on E-Commerce* ACAFTA (WGEC ACAFTA) dilaksanakan pada 22-23 November 2023. Pertemuan tersebut membahas beberapa artikel *Chapter E-Commerce* dan berhasil menyepakati satu paragraf artikel *Online Consumer Protection*. Kedua pihak saling menyampaikan pandangannya dalam beberapa isu dan akan menyampaikan jawaban tertulis atas beberapa pertanyaan secara intersesi.

Gambar 3.17

Pertemuan Ke-6 Working Group on E-Commerce ACAFTA (WGEC ACAFTA)



Perundingan Multilateral dan Lainnya

1. *Joint Statement Initiative on E-Commerce WTO*

- Pertemuan JSI on *E-Commerce* dilaksanakan di kantor WTO, di Jenewa, Swiss pada tanggal 27-30 Maret 2023. Pembahasan berfokus pada *outstanding issues* dalam perundingan plurilateral seperti Isu terkait *Privacy*, *Updating on Telecommunication Services Reference Papers*, *Cryptography*, dan *Source Code*. Selain itu, terdapat juga *information sharing session* mengenai *Legal Architecture* dari JSI *E-Commerce*, *Custom Moratorium on Electronic Transmission*, *Cross-Border Data Flow*, serta *Proposal Pantai Gading* dan *Guatemala* terkait *Special and Differential Treatment (S&DT)* dan *Implementation Period*.
- Pertemuan JSI on *E-Commerce* diadakan di kantor WTO, di Jenewa, Swiss pada tanggal 26-29 April 2023. Pertemuan dilakukan dalam kelompok kecil atau *small group discussion* yang membahas mengenai beberapa *pending issues* yang mencakup *personal information/data protection*, *source code*, *cryptography*, dan *single windows data exchange*. Dalam pertemuan tersebut, negara partisipan masih belum mencapai konsensus terkait beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan JSI *E-Commerce* dan pembahasan *pending issues* tersebut akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.
- Pertemuan JSI on *E-Commerce* WTO dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 22-25 Mei 2023. Pertemuan membahas *pending issues* yaitu *personal*

information/data protection, source code, cryptography, telecommunication reference paper, implementation period, e-payments, data flow and localization dan *single windows data exchange*. Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga menyampaikan pentingnya pembahasan artikel *e-payment* dalam JSI *E-Commerce* sebagai *guidance* dalam sistem pembayaran internasional.

- Pertemuan JSI *on E-Commerce* WTO di Jenewa, Swiss pada tanggal 19-22 Juni 2023 membahas beberapa *pending issues* yaitu *source code, cryptography, telecommunication reference paper, development, privacy, e-payments, data flow and localization, single windows data exchange*, dan *general and security exception*. Pada pertemuan ini, negara partisipan belum mencapai konsensus pada sebagian besar artikel dalam teks JSI *on E-Commerce*.
- Pertemuan Perundingan *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce* atau JSI *E-Commerce* WTO di Jenewa, Swiss pada 26-29 September 2023. Pertemuan membahas beberapa pending issues yaitu *Cryptography, Source Code, Development, Discipline on Telecommunication Services, Privacy, Horizontal Issues*, serta *Data Flows and Localisation*. Secara umum, pertemuan belum mendapatkan konsensus pada isu-isu tersebut. Pada pertemuan ini, Indonesia juga menyampaikan bahwa JSI *E-Commerce* WTO dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kapasitas negara berkembang dan LDCs pada isu ekonomi digital serta menjadi solusi dari adanya permasalahan *digital divide*.
- Pertemuan Perundingan *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce* atau JSI *E-Commerce* WTO secara relay dari Jenewa, Swiss pada 25-27 Oktober 2023. Pertemuan membahas beberapa *pending issues* yaitu *Cryptography, Development, Discipline on Telecommunication Services, Privacy, Scope, Development*, serta *Data Flows and Localisation*. Secara umum, pertemuan belum mendapatkan konsensus pada isu-isu tersebut. Pada pertemuan ini, Dubes Tan Hung Sen dari Singapura selaku *Co-Convener* menyampaikan harapannya kepada negara partisipan dapat lebih fleksibel terhadap beberapa *pending issues* dalam teks JSI *E-Commerce* WTO agar

tercapainya *substantial conclusion* pada pertemuan bulan November mendatang.

- Pertemuan Perundingan *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce* atau JSI *E-Commerce* WTO dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada 27-30 November 2023. Pertemuan membahas beberapa *pending issues* yaitu *Cryptography, Development, Privacy, Telecommunication Services Discipline, Data Flows and Data Localization, Custom Duties on Electronic Transmission (CDET) dan Horizontal Issue*. Pada pertemuan ini, Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap pembahasan artikel CDET pada forum JSI *E-Commerce* WTO. Pembahasan terkait CDET sebaiknya dibahas secara multilateral di WTO. Negara berkembang juga masih memerlukan *policy space* untuk isu tersebut.

Gambar 3.18

Pertemuan Perundingan *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce* atau JSI *E-Commerce* WTO pada 25-27 Oktober 2023



2. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

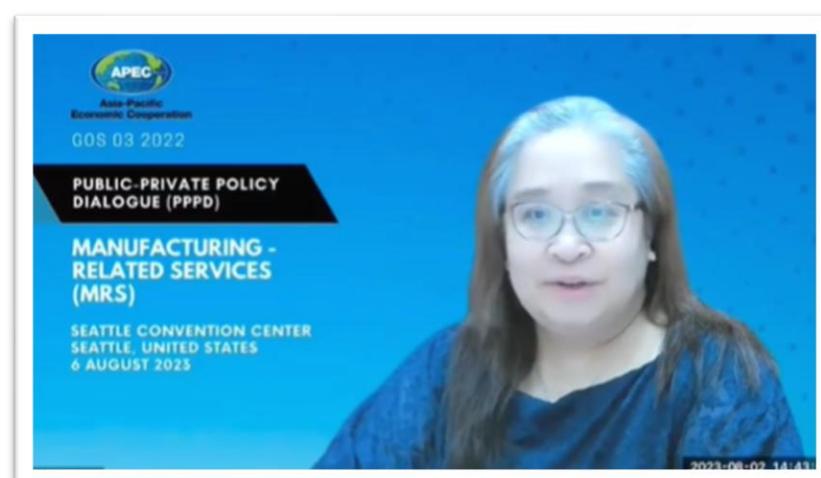
- Direktur Perundingan Perdagangan Jasa memaparkan isu reformasi struktural perdagangan jasa dalam Pertemuan APEC *Services Competitiveness Roadmap Annual Dialogue* 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat pada 19 Mei 2023. Pada kesempatan tersebut, Direktur PPJ menyampaikan dukungan

rencana aksi yang telah diinisiasi oleh ekonomi APEC melalui reformasi struktural dan kebijakan terkait upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, Direktur PPJ menyampaikan pula sejumlah kebijakan yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka mendukung reformasi struktural bidang perdagangan jasa, misalnya penyederhanaan regulasi dan peningkatan kapasitas institusi yang menangani perdagangan jasa.

- Direktur Perundingan Perdagangan Jasa menyampaikan paparan pada the *3rd Senior Officials Meeting*, APEC pada 6 agustus 2023. Direktur PPJ mengangkat tema "*The Public-Private Policy Dialogue on Manufacturing Related Services*." Pada kesempatan itu Direktur PPJ, menyampaikan gambaran tentang *services value-added* dalam industri manufaktur di Indonesia dan pandangan Indonesia terkait konsep MRS. Selanjutnya, Dir PPJ menyampaikan harapan Indonesia agar proyek-proyek MRS dapat dieksplorasi lebih jauh dan APEC dapat melakukan penelitian untuk mengeksplorasi implikasi teknologi baru guna mendorong liberalisasi dan memfasilitasi perdagangan di bidang jasa terkait manufaktur.

Gambar 3.19

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa menyampaikan paparan pada the *3rd Senior Officials Meeting*, APEC pada 6 agustus 2023



3. Indo Pacific Economic Framework (IPEF)

- Perundingan Kedua Indo-Pacific *Economic Framework* (IPEF) Klaster *Digital Economy* di bawah Pillar 1 Perdagangan dilaksanakan pada 17-19 Maret 2023 di Bali. Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota negara IPEF baik secara luring maupun daring. Hadir sebagai Delegasi Indonesia dari Kementerian Perdagangan adalah Direktur Perundingan Perdagangan Jasa. Pertemuan membahas draft teks *Digital Trade* usulan Amerika Serikat (AS). Masing-masing negara anggota IPEF menyampaikan pandangan dan pertanyaan terhadap teks usulan AS tersebut. Indonesia menyampaikan *non-paper* sebagai bentuk respon atas teks proposal AS.
- Perundingan Putaran Ketiga IPEF Klaster *Digital Economy* dan *Services Domestic Regulation* (SDR) dilaksanakan pada tanggal 8-13 Mei 2023. Kedua klaster tersebut membahas masukan pada teks dari masing-masing negara IPEF. Pada Klaster *Digital Economy*, Indonesia kembali menyampaikan *non-paper* kedua yang berisi poin-poin yang menjadi *interest* Indonesia. Sementara itu, pada Klaster *Services Domestic Regulation* (SDR), pertemuan fokus membahas teks guna memastikan bahwa ketentuan SDR di IPEF sejalan dengan GATS.
- Perundingan Putaran Ke-4 Indo Pacific *Economic Framework* (IPEF) for *Prosperity* untuk Klaster *Digital Economy* dan *Services Domestic Regulation* (SDR) dilaksanakan pada tanggal 9-14 Juli 2023. Pertemuan melanjutkan pembahasan *draft text Chapter* SDR dan *Digital Trade* terkait masukan atau tanggapan dari masing-masing anggota IPEF.
- Perundingan Putaran Ke-5 Klaster *Digital Economy* dan *Services Domestic Regulation* Indo Pacific *Economic Framework* (IPEF) for *Prosperity* dilaksanakan pada 10-16 September 2023. Pertemuan ini membahas *draft text* Klaster *Digital Economy* dan *Services Domestic Regulation* dan masing-masing negara anggota IPEF memberikan masukan serta tanggapan terkait *draft text* usulan AS.
- Pertemuan Klaster *Digital Economy* Indo Pacific *Economic Framework* (IPEF) for *Prosperity* di San Francisco, California, Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 9-12 November 2023. Dalam klaster tersebut, dibahas beberapa

pending issues yang tersisa pada putaran sebelumnya serta November Package khusus beberapa artikel yang ditargetkan *conclude* pada putaran kali ini.

Gambar 3.20

Pertemuan Klaster *Digital Economy* Indo Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 9-12 November 2023



3.3 PROGRES PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA PRIORITAS TAHUN 2023

Berdasarkan Perkin tahun 2023, Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki target kinerja 2 (dua) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan yaitu *Upgrading ASEAN-Australia-New-Zealand FTA* (AANZFTA) dan *ASEAN Services Facilitation Framework* (ASFF). *Upgrading ASEAN-Australia-New-Zealand FTA* (AANZFTA) telah di tandatangani dan *ASEAN Services Facilitation Framework* (ASFF) telah diselesaikan sebagai salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023. Selain mencapai target kinerja 2 perundingan di sektor jasa, DPPJ telah memfinalisasi secara substansi perundingan akses pasar dan bab *e-commerce* dalam Perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Jepang EPA.

Perkembangan progres pencapaian target kinerja Perundingan Perdagangan Jasa tahun 2023, sebagai berikut :

Perundingan yang telah ditandatangani

1. *Upgrading ASEAN-Australia-New-Zealand FTA (AANZFTA)*

2nd Protocol to Amend The Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade (*2nd Protocol AANZFTA*) telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI pada tanggal 21 Agustus 2023 di Semarang bersama dengan Menteri Ekonomi Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru di sela-sela rangkaian Pertemuan ke-55 para Menteri Ekonomi ASEAN (55th ASEAN Economic Ministers'/AEM Meeting). Menteri Ekonomi ASEAN lainnya akan menandatangani protokol ini secara *ad-referendum*/bergantian. Penandatanganan *2nd Protocol AANZFTA* ini berarti Indonesia telah berhasil menyelesaikan salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023.

AANZFTA merupakan perjanjian yang dilakukan oleh 10 Negara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru dan termasuk perjanjian tradisional dalam wilayah Asia Pasifik. Perjanjian ini memiliki cakupan yang luas, dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi regional antara ASEAN dan kedua negara tersebut, termasuk liberalisasi perdagangan dan peningkatan perdagangan serta investasi, yang bertujuan untuk meningkatkan arus barang dan jasa lintas batas, investasi, serta pergerakan tenaga kerja pada 10 AMS dengan Australia dan New Zealand.

Tujuan *Upgrading AANZFTA* adalah liberalisasi perdagangan jasa dengan cakupan sektor yang lebih besar, liberalisasi dan fasilitasi perdagangan melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif, mendorong peningkatan investasi dan peluang investasi antar negara dan membangun kerangka kerja sama untuk memperkuat, mendiversifikasi, dan meningkatkan perdagangan serta hubungan ekonomi antar negara. Peluang sektor jasa Indonesia dalam perjanjian AANZ FTA mencakup sektor Jasa Bisnis, Jasa Asuransi, Jasa Konstruksi, Jasa Komunikasi, Jasa Keuangan, Jasa Transportasi Udara.

Perundingan yang telah diselesaikan sebagai salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023

1. ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF)

ASFF merupakan salah satu *Priority Economic Deliverables* (PED) pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. ASFF merupakan framework kerja sama ASEAN dalam memfasilitasi sektor jasa melalui penyediaan jasa yang terpadu dan terkoordinasi sehingga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha jasa dari ASEAN dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik seperti prosedur yang lebih jelas dan mengurangi hambatan birokrasi dalam penyediaan jasa lintas batas (*cross-border services*) ke pasar ASEAN. Transparansi ASFF mengadopsi berbagai elemen/disiplin dari teks *Agreement* atau *Framework* seperti GATS, ASEAN *Investment Facilitation Framework* (AIFF), ATISA, WTO JISDR dan beberapa *Agreement* lainnya.

Draft Text telah disepakati seluruh AMS pada pertemuan *Third Special Meeting of the Coordinating Committee on Services* (3rd Special CCS) di Lao PDR pada tanggal 7 – 9 Agustus 2023 dan dicatat pada Pertemuan AEM ke-55 pada tanggal 17-23 Agustus 2023, di Semarang, Indonesia oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Proses *legal scrubbing* teks ASFF juga telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.

Saat ini seluruh AMS tengah melakukan proses penyelesaian proses domestik agar ASFF dapat diadopsi pada the 30th AEM Retreat yang dijadwalkan tentative pada 7-8 Maret 2024.

Perundingan yang telah diselesaikan secara substansi perundingan perdagangan jasa dan e-commerce

1. Indonesia-Jepang EPA (Protokol Perubahan IJEPA)

Pertemuan Intersesi *Sub Committee Trade in Services* dalam kerangka Protokol Perubahan IJEPA telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Pada pertemuan intersesi di tanggal 2 Agustus 2023 kedua pihak membahas Pasal *Cross-Border Flows of Information* (96F) dan *Location of Computing Facilities* (96G). Terkait dengan usulan Indonesia mengenai Pasal *Dispute Settlement*, Jepang menyampaikan bahwa pengaturan *security exception* sudah terdapat

dalam *Chapter General Exception*. Jepang juga menyampaikan bahwa mereka tidak dapat menyepakati inklusi *security exception* dan pengecualian *dispute settlement* dalam *chapter* ini. Sementara itu pada pertemuan intersesi pada tanggal 14 Agustus 2023 yang diselenggarakan di Kementerian Perdagangan secara luring, melanjutkan pembahasan *draft text electronic commerce* yang diusulkan Jepang. Kedua pihak berhasil menyepakati beberapa artikel, yaitu *Scope, Definitions, dan Cooperation*.

Kedua Pihak melanjutkan pembahasan pada pertemuan *Chief Negotiator* tanggal 28 Agustus 2023, dimana Jepang dapat menerima pengaturan *security exception* usulan Indonesia. Jepang juga dapat menerima inklusi pengaturan tersebut pada Artikel *Source Code* yang sudah disepakati sebelumnya, dengan catatan bahwa elemen *security exception* tersebut dikecualikan hanya dari penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) di bawah Bab 14 *Dispute Settlement*. Dengan demikian, kedua pihak telah menyepakati secara substansi draft teks *Chapter on E-commerce*. Sebagai tindak lanjut, Kedua pihak akan menyiapkan proses *legal scrubbing* atas keseluruhan teks yang telah disepakati. Kesepakatan terkait e-commerce ini merupakan kesepakatan internasional di bidang *e-commerce/digital trade* ketiga yang dimiliki Indonesia dalam perundingan bilateral dengan Negara Mitra setelah Indonesia Australia CEPA dan Indonesia UAE CEPA.

Pada pertemuan *Chief Negotiator* pada tanggal 28 Agustus 2023, lebih lanjut terkait dengan perundingan akses pasar Indonesia memberikan *offer* di bidang *real estate* kepada Jepang dengan maksimal partisipasi modal asing sebesar 51%. Sebagai timbal balik, Jepang juga akan memberikan program *capacity building* di bidang yang sama. Adapun Jepang memberikan akses pasar terkait dengan Moda 4 pada jasa perbankan.

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. **Pertama**, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional. **Kedua**, dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan

bisnisnya termasuk melalui investasi. **Ketiga**, masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada mendorong analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Beberapa aspek pengembangan perdagangan sektor jasa yang dapat dilakukan antara lain (BKPerdag, 2022):

1. **Infrastruktur Kelembagaan Perdagangan Jasa.** Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, yang menjamin *property rights*, *standardized services*, keselamatan konsumen, *public welfare*, *inklusif consumers*, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.
2. **Market Competition.** Pengembangan Perdagangan Jasa perlu memperhatikan market kompetisi yang berkesinambungan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang *intangible*.
3. **National Sovereignty.** Pengembangan Perdagangan Sektor Jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktik-praktek Bisnis dalam perdagangan jasa.
4. **Innovation and Creativity.** Pengembangan Perdagangan Jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.
5. **Small and Medium Shareholder Existences.** Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan *Small Medium Enterprises* yang merupakan *backbones* perekonomian negara. *Local SME* harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai MNEs.

6. **Privacy.** Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan *privacy* dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

3.4 SASARAN II :

TERSEDINYA DUKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN EKSPOR JASA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Indikator Kinerja 1 : Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

Tabel 3.4

Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1)

Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2023	2023	2023
Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	3 Dokumen	3 Dokumen	100

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} = & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\
 & = \frac{3}{3} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional. Kedua, masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Ditjen PPI

melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada mendorong analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut, terus dilakukan komunikasi aktif dan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas dan kredibilitas secara teori, metodologis, dan praktis. Mengingat pemangku kepentingan sektor jasa yang beraneka ragam, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa melakukan berbagai strategi pendekatan yang berbeda-beda dengan setiap pemangku kebijakan berdasarkan karakteristik masing-masing agar lebih efektif. Dengan optimalisasi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan berdasar kajian yang komprehensif, diharapkan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan.

Untuk itu, dalam rangka mendukung perundingan perdagangan jasa dan optimalisasi pemanfaatannya, Kementerian Perdagangan memiliki program penguatan kebijakan bidang jasa bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya dengan menyusun kajian sektor jasa untuk mendukung peningkatan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional:

Dalam Penguatan Kebijakan Sektor Jasa dilaksanakan pembahasan Penguatan Kebijakan Sektor Jasa yang terdiri dari:

a. Pemetaan sektor jasa prioritas pada perundingan perdagangan jasa

Pemetaan sektor jasa prioritas pada perundingan perdagangan jasa merupakan upaya meningkatkan kapasitas tim perunding dan kredibilitas hasil perundingan perdagangan jasa. Saat ini, Kemendag belum memiliki kerangka resmi yang digunakan sebagai rujukan dalam mempertimbangkan dan memprioritaskan kepentingan *offensive* dan *defensive* sektor jasa pada perundingan perdagangan jasa. Pada tahun 2022-2023, DPPJ bekerja sama dengan ARISE+ Indonesia melakukan identifikasi kriteria/indikator ekonomi dalam penentuan sektor jasa prioritas pada perundingan perdagangan jasa, serta pengembangan alat atau sistem dalam melakukan monitoring kinerja perdagangan jasa.

b. *Roadmap* perundingan perdagangan jasa dalam rangka peningkatan ekspor produk unggulan sektor jasa.

Penyusunan dan implementasi peta jalan (*roadmap*) perundingan perdagangan jasa dibutuhkan dalam rangka penguatan pembangunan sektor jasa dan perdagangan jasa. *Roadmap* mencakup analisis negara tujuan ekspor jasa dan *regulatory policies* yang berpotensi menghambat ekspor jasa. Analisis tersebut akan menjadi dukungan request pada perundingan perdagangan jasa di negara utama tujuan ekspor jasa. *Roadmap* diharapkan menjadi pedoman bagi perundingan sektor jasa dan perdagangan jasa yang memberikan arah peta jalan negara yang potensial untuk menjadi target perundingan dan ekspor jasa.

c. Potensi *automatic recognition* dalam rangka meningkatkan implementasi MRA khususnya mobilisasi tenaga profesional

Mutual Recognition Arrangement (MRA) merupakan pengakuan kompetensi tenaga kerja profesional di ASEAN. Terdapat 8 (delapan) profesi MRA yaitu : Insinyur, Arsitek, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Akuntan, Tenaga Pariwisata, Tenaga Surveyor. Hingga 2018, terdapat 4 MRA yang telah terimplementasi yaitu Insinyur, Arsitek, Akuntan, dan Tenaga Pariwisata. Melalui sertifikasi MRA, pengakuan atas profesi tenaga kerja profesional cukup dilakukan di negara masing-masing.

MRA akan memberikan peluang besar bagi tenaga kerja profesional Indonesia untuk merambah ke negara – negara anggota ASEAN. Untuk itu perlu dilakukannya penyusunan kajian Potensi Automatic Recognition dalam Rangka Meningkatkan Implementasi MRA Khususnya Mobilisasi Tenaga Profesional dengan melihat standar kompetensi dan kerangka kualifikasi sektor jasa di Indonesia.

Setelah menilaikan target dan realisasi tahun 2023 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1)

Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	100

3.5 SASARAN III:

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Indikator Kinerja 1 : Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani

Tabel 3.6
Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1)

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100

jasa ke instansi yang menangani			
--	--	--	--

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\
 &= \frac{3}{3} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan percepatan penyelesaian proses ratifikasi dan implementasi, berbagai perjanjian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor. Upaya ini juga menjadi salah satu strategi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Terkait dengan proses ratifikasi, sampai dengan akhir tahun 2023 DPPJ telah melakukan proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional antara lain:

1. ASEAN *Trade in Services Agreement* (ATISA)

Proses ratifikasi ATISA telah selesai dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan ASEAN *Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) tanggal 16 Januari 2023.

2. Indonesia-UAE CEPA

Proses ratifikasi Indonesia-UAE CEPA telah selesai dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 12 Juli 2023.

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Pemberitahuan tertulis (notifikasi) kepada Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) pada tanggal 17 Juli 2023 melalui Nota Diplomatik Nomor D/01767/07/2023. Sesuai dengan Persetujuan, maka Indonesia-UAE CEPA telah resmi diimplementasikan pada tanggal 1 September 2023.

Dengan berlakunya IUAE CEPA per tanggal 1 September 2023, Pemerintah telah mengeluarkan 5 (lima) peraturan teknis pelaksanaan IUAE CEPA:

- i. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 87/2023 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka IUAE-CEPA;
- ii. PMK 88/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan IUAE-CEPA;
- iii. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 28/2023 tentang Ketentuan Asal Barang dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan IUAE-CEPA;
- iv. Permendag 29/2023 tentang Kebijakan Penerapan Kuota Tingkat Tarif (Tariff Rate Quota) Untuk Impor Barang Tertentu dalam IUAE-CEPA; dan
- v. Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 22/2023 mengenai pedoman pelaksanaan pemanfaatan skema TRQ untuk produk bahan baku plastik tertentu dalam kerangka IUAE-CEPA.

Kemendag telah menyampaikan permintaan tertulis ke Kementerian Luar Negeri R.I. untuk meneruskan peraturan tersebut ke pihak Pemerintah Uni Emirat Arab melalui nota diplomatik.

3. Indonesia-Chile CEPA TIS

Penandatanganan *Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agreement of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile for the Incorporation of Provisions on Trade in Services* dilakukan pada tanggal 21 November 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Internasional Chile. Merujuk pada hasil rapat kerja Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perdagangan pada tanggal 4 September 2023 bahwa Komisi VI DPR RI dan Pemerintah RI c.q Kementerian Perdagangan menyetujui pembahasan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Chile (Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement*) untuk Penggabungan

Ketentuan-ketentuan Perdagangan Jasa akan dilaksanakan melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).

Setelah menilaikan target dan realisasi tahun 2023 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian table berikut.

Tabel 3.7

Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1)

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100

SASARAN III:

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Indikator Kinerja 2 : Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Tabel 3.8

Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2)

Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2023	2023	2023
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	83 %	83 %	100

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} = & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\
 & = \frac{3}{3} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Melalui FGD-FGD dan konsultasi teknis yang dilakukan DPPJ, ditabulasi kuesioner bahwa 83 % pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Tabulasi Kuesioner berasal dari kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa yang sudah terlaksana pada tahun 2023.

1. FGD Indonesia-EU CEPA, Surakarta 26 Januari 2023

FGD bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan akademisi dalam rangka mempersiapkan posisi runding Indonesia pada Perundingan Indonesia-EU CEPA. Peserta FGD berasal dari perwakilan pemerintah daerah Kota Surakarta, KADIN, asosiasi pelaku usaha dan profesi, dan akademisi.

Diskusi berlangsung produktif dengan menghasilkan informasi dan masukan penting bagi tim perunding dalam merumuskan strategi dan posisi pada perundingan perdagangan jasa Indonesia-EU CEPA.

Gambar 3.21
FGD Indonesia-EU CEPA, Surakarta 26 Januari 2023



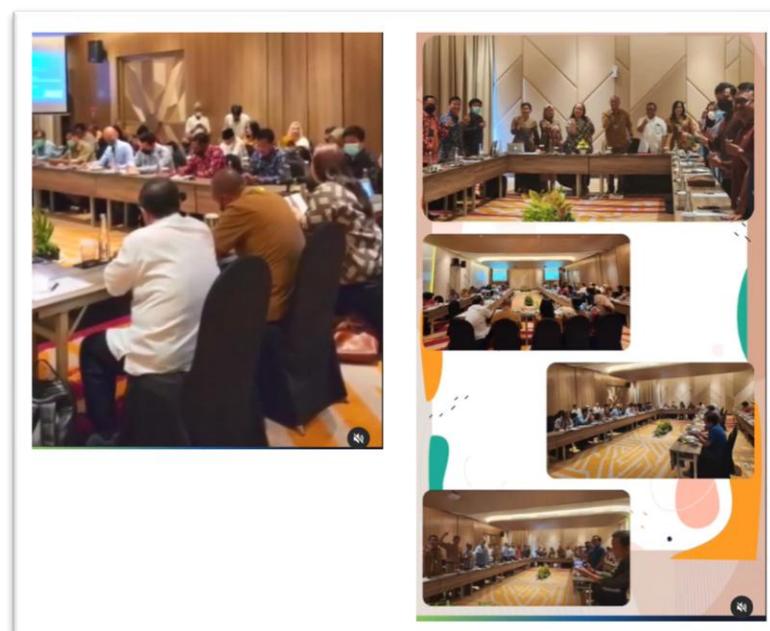
2. FGD Perkembangan Perjanjian Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Sektor Perdagangan Jasa, Malang 14 Februari 2023

FGD bertujuan untuk mendorong pemanfaatan perjanjian IK-CEPA oleh pelaku jasa nasional di Kota Malang dan sekitarnya agar dapat melakukan kerja sama dan ekspor jasa ke Korea Selatan untuk sektor jasa potensial diantaranya jasa pendidikan, pariwisata dan industri. FGD diawali dengan pembukaan oleh Ibu Basaria Tiara L. Gaol selaku Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kemendag dan sambutan oleh Bapak Eko Sri Yuliadi selaku Kepala Dinas Kopindag Pemerintah Kota Malang mengenai perkembangan perdagangan jasa di Kota Malang.

Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Ibu Florika Malau dari DPPJ Kemendag; Ibu Mahdewi Silky dari Direktorat Perundingan Bilateral Kemendag; dan Bapak Deddy Suhajadi, Wakil Ketua Kadin Kota Malang. Peserta FGD terdiri dari perwakilan dinas pemerintah daerah, asosiasi

pelaku usaha dan akademisi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pelaku usaha sektor jasa Indonesia khususnya dari Kota Malang dapat memanfaatkan Perjanjian IK-CEPA secara maksimal dalam rangka peningkatan ekspor dan perekonomian.

Gambar 3.22
**FGD Perkembangan Perjanjian IK-CEPA Sektor Perdagangan Jasa,
Malang 14 Februari 2023**



3. Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pemanfaatan Persetujuan Perdagangan Jasa pada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Kota Bandung, Jawa Barat, 6 Maret 2023.
Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdadin) Kota Bandung dan dihadiri oleh kalangan perangkat pemerintahan daerah kota Bandung, pelaku usaha dan asosiasi, serta akademisi dari sejumlah universitas di kota Bandung.
4. FGD Hambatan Investasi dan Perdagangan Jasa dalam Ekonomi Indonesia dalam rangka menggali informasi terkini tentang situasi sektor jasa di Indonesia, Jogjakarta 9 Maret 2023

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa (DPPJ) bekerja sama dengan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Hambatan Investasi dan Perdagangan Jasa dalam Ekonomi Indonesia dalam rangka menggali informasi terkini tentang situasi sektor jasa di Indonesia, terutama tentang tingkat keterbukaannya terhadap perdagangan jasa internasional.

FGD ini dibuka oleh Direktur PPJ, kemudian materi pertama disampaikan oleh Dr. Riza Noer Arfani (Kepala PSPD UGM) tentang Peran Sektor Jasa dalam Ekonomi Indonesia: Isu Strategis & Usulan Agenda Kebijakan. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Indra Prahasta mengenai tingkat hambatan investasi dan perdagangan jasa Indonesia menurut OECD STRI. Terakhir, materi disampaikan oleh Ibu Aju Widya Sari (Direktur Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika) mengenai Peran Sektor Jasa Telekomunikasi Dalam Ekonomi Indonesia dan juga Penyelenggaraan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) di Indonesia

Gambar 3.23

**FGD Hambatan Investasi dan Perdagangan Jasa dalam Ekonomi Indonesia,
Yogjakarta 9 Maret 2023**



5. Konsultasi Teknis Pemanfaatan Persetujuan IUAЕ-CEPA Sektor Perdagangan Jasa dan Digital, Surabaya 3 Mei 2023.

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan Konsultasi Publik Pemanfaatan Persetujuan IUAЕ-CEPA Sektor Perdagangan Jasa dan Digital. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Direktur Perundingan Perdagangan Jasa.

Kegiatan konsultasi publik ini menekankan pada pembahasan potensi perdagangan digital melalui pemanfaatan Persetujuan IUAЕ CEPA, dengan menghadirkan 4 (empat) narasumber, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Ibu Florika Malau, selaku Negosiator Perdagangan Ahli Madya DPPJ Kemendag; Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag; Direktur Perundingan Bilateral, Kemendag; serta Wakil Ketua KADIN Jawa Timur.

Diskusi berjalan dengan konstruktif. Baik peserta maupun pemateri saling menyampaikan pandangan dan masukan untuk peningkatan pemanfaatan persetujuan internasional yang sudah ada.

Gambar 3.24

**Konsultasi Teknis Pemanfaatan Persetujuan IUAЕ-CEPA
Sektor Perdagangan Jasa dan Digital, Surabaya 3 Mei 2023**



6. Konsultasi Teknis Perdagangan Jasa dalam Perjanjian Perdagangan Internasional, Cirebon 4 Agustus 2023

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon, telah melakukan Konsultasi Teknis Perdagangan Jasa dalam Perjanjian Perdagangan Internasional. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Direktur Perundingan Perdagangan Jasa.

Kegiatan konsultasi teknis menekankan pada pembahasan potensi ekspor jasa melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yaitu Ibu Florika Malau, selaku Negosiator Perdagangan Ahli Madya DPPJ Kemendag; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon; dan Ketua KADIN Kota Cirebon. Disebutkan bahwa sektor jasa di Kota Cirebon berpotensi untuk dieksport, seperti jasa pariwisata, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Diharapkan agar pelaku usaha dapat

memanfaatkan komitmen Indonesia dalam perundingan Perdagangan jasa internasional.

Kegiatan berjalan konstruktif. Baik peserta maupun pemateri saling menyampaikan pandangan dan masukan terkait peningkatan pemanfaatan hasil perundingan internasional di bidang jasa.

Gambar 3.25

Konsultasi Teknis Perdagangan Jasa dalam Perjanjian Perdagangan Internasional, Cirebon 4 Agustus 2023



7. Konsultasi Teknis Optimalisasi Sektor Jasa Logistik Melalui Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Jasa, Medan 19 September 2023

Tujuan kegiatan ini untuk menggali potensi sektor jasa yang dimiliki daerah dan memberi informasi agar potensi yang dimiliki tersebut dapat memasuki pasar global melalui kerja sama perjanjian perdagangan jasa FTA/CEPA. Konsultasi Teknis ini dilaksanakan atas kerja sama Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Sektor jasa transportasi dan pergudangan adalah sektor jasa yang potensial di Medan mengingat sektor ini memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2022. Sektor ini juga memiliki share terhadap PDRB sebesar 5,87%. Diharapkan dengan kegiatan ini pelaku usaha dapat memanfaatkan komitmen Indonesia dalam perundingan

perdagangan jasa internasional terutama sektor jasa transportasi dan pergudangan.

8. FGD Perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional Bidang Jasa di Manado, 10 Oktober 2023

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara mengadakan FGD Perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional Bidang Jasa. FGD menghadirkan beberapa narasumber, yakni Direktur Perundingan Perdagangan Jasa; Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Disperindag Sulawesi Utara; dan Wakil Ketua Umum KADIN Sulawesi Utara. Dalam diskusi, para stakeholders sepakat bahwa kerja sama perdagangan internasional menjadi semakin penting untuk dijadikan salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang merata, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga peran Sulawesi Utara sebagai hub/gerbang Asia Pasifik dalam perdagangan internasional. Kegiatan FGD berlangsung konstruktif, dimana pemateri dan peserta saling menyampaikan pandangan dan masukan terkait peluang pemanfaatan hasil persetujuan perdagangan jasa internasional di Sulawesi Utara.

Setelah menilaikan target dan realisasi tahun 2023 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

Tabel 3.9

Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2)

Percentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	81 %	83 %	81 %	83 %	100	100

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada sub bagian ini akan diuraikan mengenai realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.

Pagu Anggaran DPPJ Tahun 2023 : Rp. 5.400.000.000

Tabel 3.5
Pagu Anggaran dan Realisasinya Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
	PERUNDINGAN	Rp	Rp	98.86	61.741.703
	PERDAGANGAN JASA	5.400.000.000	5.338.258.297	%	

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} \quad &= \frac{\text{Realisasi 2023}}{\text{Capaian}} \times 100 = \\
 &= \frac{5.338.258.297}{5.400.000.000} \times 100 = 99.86 \%
 \end{aligned}$$

Realisasi anggaran tahun 2023 mencapai target sebesar 99.86 % meningkat dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 99,81 %.



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun Anggaran 2023 menyajikan berbagai keberhasilan capaian indikator yang ditujukan oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.
2. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dimana secara keseluruhan terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
3. Pada tahun 2023, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Dari 4 Indikator kinerja yang ditetapkan, 4 indikator mencapai target 100 %. Realisasi anggaran mencapai target sebesar 99.86 % meningkat dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 99,81 %.

4.2 LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN DI MASA YANG AKAN DATANG

1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan agar dapat dilakukan lebih cermat, khususnya dalam menetapkan target kinerja dengan mempertimbangkan baik metode penghitungan maupun sumber daya yang tersedia, termasuk faktor lainnya seperti perubahan alokasi anggaran dalam tahun berjalan yang hamper setiap tahun anggaran terjadi.
2. Peningkatan koordinasi yang lebih intensif baik secara internal maupun eksternal dalam upaya memperkecil hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan baik kegiatan teknis maupun administratif.

3. Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan, secara berkelanjutan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan DPPJ. Kemampuan dalam bernegosiasi dan kemampuan dalam menguasai isu-isu yang dirundingkan serta kemampuan dalam berbahasa asing menjadi standard kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai di lingkungan DPPJ dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Diharapkan laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran serta acuan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa yang nyata dalam penyusunan rencana/program ditahun berikutnya.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : PR.02.01/255/PPI.6/PK/12/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basaria Tiara Desika L. Gaol
Jabatan : Direktur Perundingan Perdagangan Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Djatmiko Bris Witjaksono

Basaria Tiara Desika L. Gaol

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perundingan	20
2	Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional	Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Dokumen	10
3	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani Percentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Dokumen Percentase	4 83

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan Jasa	7.000.000.000

Jakarta, 29 Desember 2022

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa



Basaria Tiara Desika L. Gaol